

RENJA PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN 2019



2019



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

<http://perindag.babelprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. bahwa Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019, berpedoman pada a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, e. Renstra 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.

Perubahan Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan urusan industri dan perdagangan, dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis saat ini dan sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pengembangan industri dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam Perubahan Renja 2019 terdapat Program/Kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan dana APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar diarahkan untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah urusan industri dan perdagangan yang diharapkan dapat berdampak kepada menciptakan lapangan kerja/menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini menuntut kepiawaian seluruh unsur pimpinan untuk melakukan inovasi, kreativitas dan terobosan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas dapat dicapai sesuai dengan tahapan yang ditentukan.

Untuk itu, hendaknya semua unsur pimpinan dan aparaturnya di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsinya.

Pangkalpinang, Oktober 2019

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Drs. H. SUNARDI, M.AP
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631223 198603 1 006**

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang, terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan.

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik

Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Daerah. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman kepada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan RPJPD 2005-2025, RPJMD tahun 2017-2022 dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan dalam rangka penyelarasan terhadap Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri F);

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 40 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang mencakup rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah :

1. Terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan urusan Industri dan Perdagangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan pilihan Industri dan Perdagangan baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Mengoptimalkan peran Pemerintah, Pelaku Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas urusan Industri dan Perdagangan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan

pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Percepatan Pembangunan melalui program/kegiatan prioritas.

Fungsi Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2019.

1.4. Sistematika Penyusunan Renja OPD

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan latar belakang disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

1.2. LANDASAN HUKUM

Mencantumkan peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Renja OPD;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Menguraikan maksud dan tujuan Renja OPD;

1.4. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN RKPD

Menguraikan isi dan bahasan tiap-tiap bab dalam Renja OPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SAMPAI TRIWULAN II

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SAMPAI TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Triwulan II mengacu pada APBD dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Menjabarkan indikator kinerja pelayanan OPD dan analisis capaian kinerja OPD;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Menguraikan Permasalahan, hambatan, peluang dan tantangan serta kaitannya dengan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja OPD dalam melaksanakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Menjabarkan program/kebijakan nasional yang dilaksanakan OPD;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Menggambarkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

BAB IV PENUTUP

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah Kebijakan Industri Nasional dalam panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang **Kebijakan Industri Nasional**. Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim
5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan
7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah

Kementerian Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dituntut untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian. Tujuan pembangunan industri untuk 5

(lima) tahun kedepan yaitu "*Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing*".

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perindustrian 2015 – 2019. yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan non migas terhadap PDB Nasional
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non migas terhadap ekspor nasional
3. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM
 - b. Penyerapan Tenaga Kerja IKM
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri
5. Memperkuat Struktur Industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Rasio impor bahan baku, barang penolong dan bahan modal terhadap PDB Industri Pengolahan non migas.
6. Meningkatnya Pengembangan Inovasi dan Penguasaan Teknologi, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

7. Meningkatnya Pemerataan dan Penyebaran Industri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Persentase nilai tambah sektor industri di luar pulau Jawa terhadap total nilai tambah sektor industri dan persentase jumlah unit usaha industri besar sedang diluar pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik disektor perdagangan.

Penekanan sasaran strategis jangka menengah Kementerian Perdagangan 2015 – 2019 yang terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Pertumbuhan ekspor nonmigas;
 - b. Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor.

2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional untuk mendukung daya saing produk Indonesia di pasar domestik, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Persentase penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor;
 - b. Persentase pengamanan kebijakan nasional
3. Meningkatnya Promosi Citra Produk Ekspor (*Nation Branding*), indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (*nation branding*);
 - b. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor.
4. Penguatan Pasar Dalam Negeri, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan
 - b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional.
5. Meningkatnya Pemanfaatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG, dan Pasar Lelang, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Pertumbuhan Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);
 - b. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan;
6. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah : Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu.
7. Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa, indikator kinerja sasaran sinergisnya adalah :
 - a. Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan;
 - b. Persentase barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan industri Bangka Belitung berbasis potensi daerah;
2. Pengendalian inflasi dan efisiensi distribusi perdagangan dalam negeri;
3. Mengembangkan Kinerja Ekspor;
4. Peningkatan Perlindungan Konsumen;
5. Peningkatan PAD;
6. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran agar terwujud tertib administrasi perkantoran.

Dari 6 (enam) Tujuan diatas akan dicapai dengan 14 (empat belas) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Industri Sektor Pertanian;
2. Meningkatnya Industri Sektor Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya Industri Sektor Pariwisata;
4. Meningkatnya Industri Sektor Pertambangan;
5. Meningkatnya tenaga Kerja Industri;
6. Meningkatnya Pembangunan Kawasan Industri;
7. Meningkatnya Industri pangan yang memproduksi sesuai dengan standar kesehatan industri;
8. Melakukan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok;

9. Meningkatnya koordinasi pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat;
10. Meningkatnya ketersediaan sarana perdagangan;
11. Meningkatnya Produk Ekspor, Ekportir dan terpantaunya produk impor;
12. Penurunan Jumlah Pengaduan Konsumen;
13. Meningkatnya jumlah Penerimaan Retribusi pengujian;
14. Meningkatnya sarana dan prasarana, sistem pelaporan dan kompetensi sumber daya aparatur.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan 2 (dua) Urusan Pilihan, yaitu : Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);.

Lebih jelas rencana Perubahan program dan kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3. di bawah ini :



Tabel 3.3.

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2019			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
I	Urusan Pilihan							
01	3.07.3.06.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100%	5.337.906.400		100%
			Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah;		3 Nilai;			

1	3.07.3.06.01.01.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Terlayani Selama 12 bulan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	132 orang	753.800.000	APBD	
2	3.07.3.06.01.01.02	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Terlayani Selama 12 Bulan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD	132 orang	4.516.026.400	APBD	
3	3.07.3.06.01.01.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Luar Daerah, SKPD	10 orang	20.600.000	APBD	
4	3.07.3.06.01.01.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah Dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Panjang Menengah Perangkat Daerah Diatas 85 %	Provinsi, SKPD	2 dokumen	35.230.000	APBD	
5	3.07.3.06.01.01.05	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Dengan Realisasi Target Diatas 90 %	SKPD	5 jenis dokumen	12.250.000	APBD	
Pilihan Perdagangan								
02	3.07.3.06.01.02	Program Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Volume Ekspor;		862.000 ton;	1.033.662.000		

			Persentase pemantauan dan pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok)		83 %;			
			Persentase Rumah Tangga Miskin yang Bekerja di Sektor Perdagangan;		10 %;			
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Dibangun;		63 %;			
			Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang Diterbitkan;		20 %;			
			Pertumbuhan Komoditi yang Terjual Melalui Pasar Lelang;		1 komoditi			
			Presentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri		10%			
6	3.07.3.06.01.02.01	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pelaksanaan	Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30 kali	222.865.000	APBD	
7	3.07.3.06.01.02.03	Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Pelaku Usaha	Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	45 pelaku usaha	12.280.000	APBD	
8	3.07.3.06.01.02.05	Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Jumlah Sarana dan Perlengkapan Gudang dan Sistem Resi gudang yang dijalankan/terkelola	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 bangunan dan sistem resi gudang	400.000.000	APBD	

9	3.07.3.06.01.02.06	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha	Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	40 pelaku usaha	33.570.000	APBD	
10	3.07.3.06.01.02.07	Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah Keikutsertaan	Luar Daerah	3 Kali	202.802.000	APBD	
11	3.07.3.06.01.02.09	Informasi Perdagangan Dalam Negeri	Tersedianya Data Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belituing	20 komoditi	32.665.000	APBD	
13	3.07.3.06.01.02.38	Pengadaan Gerobak	Jumlah Gerobak	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 unit	0	APBD	
14	3.07.3.06.01.02.39	Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	Jumlah Orang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10 orang	122.280.000	APBD	
15	3.07.3.06.01.02.40	Partisipasi Pepper Day	Terlaksananya Kegiatan Partisipasi	Kab Belitung	11 orang	7.200.000	APBD	
03	3.06.3.06.01.05	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian	Indeks Keberdayaan Konsumen;		22 Indeks;	235.155.000		

			Persentase Pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga);		14%			
			Persentase Pengembangan Standarisasi dan Lab Kemetrologian		20%			
16	3.06.3.06.01.05.01	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah Barang dan Jasa	7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10 barang dan jasa	28.700.000	APBD	
17	3.06.3.06.01.05.03	Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Jumlah Peserta	Kota Pangkalpinang	100 orang	74.590.000		
18	3.06.3.06.01.05.04	Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen	7 Kab/Kota	36 pengaduan	42.180.000	APBD	
19	3.06.3.06.01.05.08	Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Konsumen	Kota Pangkalpinang	400 Konsumen	47.025.000	APBD	
20	3.06.3.06.01.05.11	Penyusunan Daftar Jumlah Jenis dan Massa Berlaku Standar Ukur	Dokumen Daftar Jumlah Jenis dan Massa Berlaku Standar Ukur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 dokumen	0	APBD	

21	3.06.3.06.01.05.14	Pelaksanaan Penentuan Penegakan Hukum Pelanggaran Dalam Rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	Kasus	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 kasus	30.960.000	APBD	
22	3.06.3.06.01.05.15	Pengawasan Tertib Niaga	Jumlah Pegawai	7 Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14 kali	11.700.000	APBD	
04	3.06.3.06.01.06.	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase Komoditi Unggulan Daerah yang Diuji (7 komoditi) dan Kalibrasi Peralatan (4 besaran)		18%	1.687.769.000		
23	3.06.3.06.01.06.01	Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Jumlah Pegawai	Luar Daerah, Provinsi	23 orang	1.344.569.000	APBD	
24	3.06.3.06.01.06.02	Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Jumlah Lingkup Akreditasi	SKPD, Provinsi, Luar Daerah	3 ruang lingkup	32.050.000	APBD	

25	3.06.3.06.01.06.03	Monitoring Mutu Pengujian	Laporan Mutu Komoditi	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur	1 laporan	89.350.000	APBD	
26	3.06.3.06.01.06.04	Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	Jumlah Personil Terlatih	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkalpinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah	10 orang	32.000.000	APBD	
27	3.06.3.06.01.06.06	Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	Jumlah Peserta	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung	50 peserta	189.800.000	APBD	
Urusan Perindustrian								

05	3.06.3.06.01.03	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri	Jumlah Kawasan Strategis/Kawasan Industri/Kawasan Sentra;		1 Kawasan;	114.060.000		
			Jumlah Industri yang Memenuhi Standar Industri		15 Industri			
28	3.06.3.06.01.03.01	Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen yang Tersusun	Provinsi Kep. Bangka Belitung	1 dokumen	23.095.000	APBD	
29	3.06.3.06.01.03.04	Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah Industri Besar dan SIKIM yang Teregistrasi	Provinsi	1 unit	7.850.000	APBD	
30	3.06.3.06.01.03.05	Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	Jumlah Lokasi Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	Belitung Timur	2 lokasi	28.570.000	APBD	
31	3.06.3.06.01.03.06	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Jumlah Industri yang Diawasi	7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50 industri	4.830.000	APBD	
32	3.06.3.06.01.03.07	Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	Jumlah Peserta yang Memahami Standar Produk Industri	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	60 peserta	42.715.000	APBD	
33	3.06.3.06.01.03.08	Pendataan Perizinan Industri	Jumlah Buku yang Disusun	Provinsi, 7 kab/Kota	1 buku	7.000.000	APBD	

06	3.06.3.06.01.04	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitas dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Industri Terhadap Total Tenaga Kerja;		5,17 %;	2.802.598.300		
			Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Industri Kelautan dan Perikanan;		0,7 %;			
			Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Industri Pariwisata;		0,319 %;			
			Persentase Industri yang Memiliki Informasi Kandungan Nutrisi Olahan Pangan;		4,68 %;			
			Pertumbuhan Industri pada Sektor Pertanian;		1.499 unit;			
			Persentase Tenaga Kerja Industri pada Sektor Pertanian;		10,28%			
			Pertumbuhan Industri Turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang Dikembangkan;		4 unit;			

			Persentase Tenaga Kerja yang Terserap di Bidang Industri Turunan Pertambangan`		1,04%			
33	3.06.3.06.01.04.01	Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Jumlah SDM Yang Terlatih	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	80 pelaku industri/ masyarakat	256.760.000	APBD	
34	3.06.3.06.01.04.02	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Jumlah Pelaku Industri yang Terfasilitasi	7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	700 pelaku industri	523.199.900	APBD	
35	3.06.3.06.01.04.03	Inkubator Wirausaha baru	Jumlah Kelompok	Provinsi Kep.BangkaBelitung , Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka	3 kelompok	0	APBD	
36	3.06.3.06.01.04.04	Pemberdayaan Dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/Masyarakat	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	500 pelaku industri/ masyarakat	783.315.000	APBD	
37	3.06.3.06.01.04.05	Rumah Pengembangan Produk	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	400 pelaku industri	312.450.000	APBD	

38	3.06.3.06.01.04.08	Lomba Industri Kreatif	Jumlah Produk Kreatif	Provinsi dan Luar Daerah	30 produk	59.995.000	APBD	
39	3.06.3.06.01.04.09	Promosi/Gelar Produk Industri	Jumlah Event	Provinsi Kep. Bangka Belitung /Luar Daerah,	9 event	719.913.500	APBD	
40	3.06.3.06.01.04.10	Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Jumlah OVOP	Provinsi, Luar Daerah	9 OVOP	61.575.000	APBD	
41	3.07.3.06.01.04.11	Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Teknologi Tepat Guna	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 TTG	0	APBD	
42	3.06.3.06.01.04.12	Fasilitasi Uji Nutrisi	Jumlah Produk yang Memiliki Informasi Nutrisi	Provinsi Kep. Bangka Belitung /Luar Daerah,	120 produk	85.389.900	APBD	
TOTAL						11.211.150.700		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disusun dengan berpedoman pada Renstra 2017-2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019. Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja ini didasarkan atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKAP-PD.

Pangkalpinang, Oktober 2019

**KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Drs. H. SUNARDI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19631223 198603 1 006**

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang 33148

Telp : 0717 – 439 093

Web : <http://perindag.babelprov.go.id>

Fax : 0717 – 439 093

email : perindag@babelprov.go.id